

PERANG DAGANG DAN PROTEKSIONISME DALAM KAJIAN EKONOMI POLITIK ATAS KEBIJAKAN TARIF DALAM HUBUNGAN DAGANG BILATERAL

Dela Marsela¹, Irma Wulansari², Fasya Aulia Azahra³, Rahmayati Putri⁴, Ayu Sabila⁵, Enjum Jumhana⁶

Universitas Bina Bangsa

Email : - marseladela181@gmail.com¹, irmawulansari898@gmail.com²,
fasyauliaazahra01@gmail.com³, rachmayatiputri002@gmail.com⁴, ayusabilalala5@gmail.com⁵,
jumhanad@gmail.com⁶

ABSTRAK

Perang dagang dan proteksionisme menjadi fenomena utama dalam dinamika perdagangan global saat ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh tentang komponen ekonomi politik yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan tarif dalam konteks hubungan perdagangan bilateral. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah konflik ekonomi yang berdampak besar pada kedua negara tersebut dan negara lain, termasuk Indonesia. Perang dagang ini dimulai pada tahun 2018 dengan kebijakan tarif tinggi AS terhadap produk Tiongkok, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan tarif serupa.¹ Konflik ini memiliki efek domino pada negara-negara mitra dagang lainnya, termasuk penurunan permintaan, pelemahan harga komoditas di seluruh dunia, dan gangguan pada rantai pasokan global.

Selain menghadapi dampak signifikan sebagai mitra dagang utama kedua negara, Indonesia juga memiliki peluang strategis untuk dimanfaatkan, seperti menarik investasi asing, meningkatkan ekspor ke pasar baru, dan memperkuat industri dalam negeri. Rantai pasokan global dapat terganggu oleh perang dagang yang berkepanjangan, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidakpastian pasar, dan meningkatkan investasi. Hasilnya menegaskan bahwa untuk mencegah konflik tersebut berkembang menjadi perang dagang yang merugikan semua pihak, diplomasi ekonomi dan kerja sama multilateral harus digunakan. Selain itu, sebagai langkah menuju sistem perdagangan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan menguntungkan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerja sama internasional dan pengembangan regulasi yang adil.

Kata Kunci: Perang Dagang, Proteksionisme, Diplomasi Ekonomi

ABSTRACT

Trade wars and protectionism are major phenomena in the dynamics of global trade today. The purpose of this article is to conduct a comprehensive analysis of the political economy components responsible for the implementation of tariff policies in the context of bilateral trade relations. The trade war between the United States and China is an economic conflict that

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

has had a major impact on both countries and other countries, including Indonesia. The trade war began in 2018 with the US's high tariff policy on Chinese products, which was then responded to by China with similar tariffs. This conflict has had a domino effect on other trading partner countries, including decreasing demand, weakening commodity prices worldwide, and disrupting the global supply chain. In addition to facing significant impacts as a major trading partner of both countries, Indonesia also has strategic opportunities to take advantage of, such as attracting foreign investment, increasing exports to new markets, and strengthening domestic industries. The global supply chain can be disrupted by a prolonged trade war, which can reduce economic growth, increase market uncertainty, and increase investment. The results emphasize that to prevent the conflict from developing into a trade war that is detrimental to all parties, economic diplomacy and multilateral cooperation must be used. In addition, as a step towards a more stable, sustainable and profitable trading system, the study recommends increasing international cooperation and developing fair regulations.

Keywords: Trade wars, Protectionism, Economic diplomacy

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin erat, perdagangan internasional adalah komponen penting dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Namun demikian, ada saat-saat ketika dinamika dalam hubungan dagang antara negara tidak berjalan dengan baik. Perang dagang dan proteksionisme biasanya muncul sebagai tanggapan terhadap kebijakan perdagangan oleh pihak lain dan sebagai cara untuk memperkuat posisi tawar nasional. Perang dagang ditandai dengan menaikkan tarif dan tindakan proteksionisme lainnya. Ini juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global. Dalam keadaan seperti ini, kebijakan tarif menjadi alat utama negara untuk mencapai tujuan politiknya dan melindungi industri domestik dari persaingan internasional. Namun, tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor politik, kekuasaan, dan kepentingan nasional yang berkontribusi pada pengambilan kebijakan. Dari sudut pandang ekonomi politik, penelitian ini menyelidiki peran dan efek proteksionisme dan perang dagang. Untuk memahami motif dan konsekuensi dari kebijakan tarif dalam hubungan dagang bilateral, perspektif ekonomi politik menjadi kerangka analisis yang penting. Dengan melihat kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara dalam hubungan bilateral, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang mempengaruhi keputusan politik ekonomi dan bagaimana hal itu berdampak pada perekonomian nasional dan internasional.

Perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah bagian dari persaingan strategis antara dua kekuatan ekonomi, teknologi, dan geopolitik terbesar di dunia. Ini berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Klaim Amerika Serikat bahwa praktik dagang China dianggap tidak adil mengarah pada konflik dagang ini.² Termasuk pencurian kekayaan intelektual, subsidi industri domestik, dan penghalang bagi perusahaan asing untuk masuk ke pasar (Office of the United States Trade Representative, 2018). Pemerintahan Trump kemudian memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China, dan China membalasnya dengan tarif serupa. Namun, selain sanksi ekonomi, kedua negara juga menyerang opini global. Sejak 2018, perang dagang antara dua negara telah menyebabkan

ketegangan ekonomi global. Tiongkok menanggapi kebijakan tarif tinggi AS terhadap lebih dari 550 miliar dolar produk Tiongkok, yang dibalas oleh Tiongkok dengan tarif serupa terhadap lebih dari 185 miliar dolar produk AS. Selain itu, pada tahun 2025, pemerintah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 32% terhadap perdagangan AS-Tiongkok.³ Kemajuan ini dipengaruhi oleh sektor perekonomian Amerika Serikat di dunia internasional, yang bertanggung jawab atas ekspor produk industri seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan teknologi. penggunaan dolar AS untuk menguasai perekonomian global melalui investasi yang signifikan di negara lain. Akibatnya, untuk mempertahankan statusnya sebagai negara adidaya, Amerika Serikat berfokus pada kemajuan ekonomi dan pertumbuhan.

Sebaliknya, Tiongkok mempercepat ekonominya dengan menurunkan biaya tenaga kerja. Dalam hal populasi, Tiongkok adalah salah satu negara terbesar di Asia. Hal ini menguntungkan sektor lapangan pekerjaan yang pada saat itu sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara, sehingga ekonomi mereka berfungsi sebagai perekonomian tertutup yang berpusat pada negara sebagai pemegang ekonomi tunggal. Tiongkok melakukan reformasi ekonomi selama pemerintahan Deng Xiaoping, yang menghasipenelkan kemajuan ekonomi Tiongkok, yang sekarang dapat memproduksi barang murah yang disukai negara-negara berkembang. Disebabkan oleh nilai pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang jauh di bawah Tiongkok dan masuknya produk Tiongkok ke Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok membuat Amerika Serikat waspada. Dengan meningkatnya ancaman perekonomian yang dapat meningkatkan defisit negara dan ditambah dengan visi Presiden Donald Trump yang akan memakmurkan masyarakat, Amerika menetapkan kebijakan proteksionisme terhadap Tiongkok dengan menetapkan tarif tinggi untuk barang impor. Ini dilakukan untuk mengurangi dampak perekonomian Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Kebijakan proteksi dalam perekonomian sebenarnya sudah dilarang dalam perjanjian FTA (Free Trade Agreement),⁴ akan tetapi Amerika mengeluarkan kebijakan ini dengan alasan bahwa Tiongkok meniru dan mencuri Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Amerika dengan meretas beberapa situs dan database teknologi di Amerika yang berisi data dan kemampuan dari produk industri yang dihasilkannya. Dengan alasan tersebut, Amerika bebas menetapkan kebijakan proteksi terhadap Tiongkok.⁵ Namun, Tiongkok membantah keras tuduhan tersebut dan menerapkan kebijakan proteksi kepada Amerika Serikat dengan memberlakukan tarif bea cukai pada barang impor. Dengan memberlakukan tarif bea cukai satu sama lain dan menghentikan pertumbuhan ekonomi negara lain, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai (Sinintya, 2018). Sebagai ekonomi internasional yang berkembang, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara dalam blok apapun, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dengan adanya kebijakan proteksi antar kedua negara, Indonesia dapat mengalami penurunan pendapatan ekspor karena tarif bea cukai yang tinggi. Hal ini juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, yang mendorong impor barang lebih banyak daripada ekspor, yang mengakibatkan penurunan ekonomi Indonesia. Kemudian, dari awal perang dagang antara AS dan Tiongkok, dari awal 2017 hingga 2020, apa yang terjadi pada ekonomi Indonesia?

Konsep proteksionalisme

Teori proteksionisme, yang berasal dari teori merkantilisme, menjelaskan bagaimana keuntungan harus diperoleh untuk memajukan perekonomian negara.⁶ Oleh karena itu, negara harus menerapkan proteksionisme untuk melindungi pedagang dari kerugian yang ditimbulkan oleh pasar bebas dan mendukung intervensi negara ke dalam pasar. Menurut Friedrich List, seorang tokoh merkantilis, suatu negara hanya harus memiliki pasar bebas untuk kepentingan pedagangnya dan negara-negara harus bekerja sama ekonomi untuk meningkatkan keuntungan

perdagangan mereka.⁷ Perjanjian pasar bebas seperti FTA dikendalikan dan disepakati oleh negara, sehingga pasar bebas tidak dapat berfungsi tanpa intervensi negara. Oleh karena itu, teori merkantilisme tampaknya tidak relevan lagi di zaman sekarang. (Lim, 2014). 5

Kemudian proteksionisme adalah kebijakan perekonomian yang ketat dalam perdagangan internasional yang bertujuan untuk mempertahankan ekonomi negara tersebut. Negara proteksionisme secara tersirat berusaha menghentikan perdagangan bebas antar negara dengan menggunakan kebijakan pajak, tata cara niaga, bea cukai, dan hambatan lainnya. Selain itu, tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah barang impor yang masuk ke negara melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menerapkan kebijakan ini. (Sukimo, 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metodologi deskriptif ini digunakan untuk melakukan sekaligus menyelidiki suatu fenomena dengan memberikan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan fakta dan terkait dengan fenomena tersebut. Penelitian ini akan membahas lebih rinci tentang faktor-faktor yang menyebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi Indonesia. Tulisan ini juga akan menjelaskan bagaimana pihak-pihak tertentu berperan dalam memicu perang dagang ini.

PEMBAHASAN

Ketika menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dikenang sebagai orang yang berpikir dengan cara yang berbeda dari pandangan umum tentang presiden AS lainnya.⁸ Itulah yang menjadikannya presiden AS yang menang dengan masalah populisme. Namun, Trump tidak memiliki legitimasi politik yang kuat di dalam negeri dan di tingkat global. Salah satu faktor penting yang memengaruhi lemahnya legitimasi politik Trump, sekaligus kontroversial, adalah intervensi Rusia, khususnya Vladimir Putin. Campur tangan Putin dalam daur ulang demokrasi Amerika yang membantu kemenangan Trump juga di luar mainstream dan garis politik AS sebagai negara superpower di dunia. Rusia adalah negara yang mewarisi sosialisme Uni Soviet, yang bertentangan dengan kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat, hingga Perang Dingin berakhir. Beberapa artikel melihat gaya kepemimpinan Trump dan dampak kebijakannya. Sebaliknya, Robert P. Haffa menulis artikel yang melihat kebijakan atau dampak kebijakan Trump dan menjelaskan bahwa baik Demokrat maupun Republik mengikuti tujuan dalam pertahanan mereka untuk kepresidenan Trump.

Ketika dia melihat liberalisme ekonomi tidak menguntungkan AS, Trump mengambil kebijakan untuk melindungi pasar domestik AS, yang merupakan salah satu contoh dari proteksionisme Trump yang berbeda dari politik yang biasa diambil oleh presiden AS yang menganut ekonomi liberal.

Setelah Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada abad ke-21, Amerika Serikat mulai memperhatikan kawasan Indo-Pasifik untuk mempertahankan status perekonomian dan pertahanan dan mengatasi kebijakan "mimpi Tiongkok". Kawasan Indo-Pasifik adalah salah satu karena memiliki wilayah yang luas, banyak negara, dan jalur perdagangan yang strategis. (Ali et al 2018).⁹ Visi dan misi Presiden Trump pada tahun 2017 adalah "we make Amerika great again", yang berarti "negara Amerika yang makmur, hebat, dan berjaya dalam bidang apapun." Kebijakan yang ditetapkan selama pemerintahan Trump bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Trump sering melakukan kunjungan ke negara-negara Asia untuk mendukung kebijakan Indo-Pacific Free and

Open dan mendorong kerja sama dengan negara lain untuk menjaga perdagangan bebas dan praktik pembiayaan infrastruktur yang transparan. Dengan kata lain, kebijakan Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan kepentingan negara melalui penekan langsung kebijakan "Impian Tiongkok" Tiongkok pada kawasan Indo-Pasifik dan membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut agar dapat menguasai sektor perekonomian internasional di kawasan Indo-Pasifik. Akibatnya, kebijakan luar negeri adalah proses pengambilan keputusan untuk mempertahankan kepentingan negara. Amerika Serikat khawatir akan munculnya penguasa ekonomi baru di wilayah Indo-Pasifik karena pertumbuhan Tiongkok pada tahun 2017 sebesar 6,9%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi AS yang hanya sebesar 2,5 persen pada tahun yang sama juga berkontribusi pada hal ini. Ketika industri Tiongkok berkembang, banyak produk dan barang ekspor Tiongkok masuk ke Amerika Serikat, menyebabkan defisit.

Dengan wilayah terbesar ketiga di dunia, Tiongkok memiliki populasi terbesar dengan 1,39 miliar orang pada tahun 2020. Perekonomian Tiongkok bergantung pada sistem perekonomian terencana Uni Soviet karena negara ini adalah salah satu negara di Asia yang menganut sistem pemerintahan komunisme. Pemerintahan Presiden Deng Xiaoping melakukan reformasi perekonomian Tiongkok pada tahun 1978, mengubah sistem perekonomian tertutup negara menjadi perekonomian terbuka yang berorientasi pasar.¹⁰ Hasil reformasi ini mendorong perdagangan dan investasi internasional, dan negara tetangga Tiongkok menggunakannya. Oleh karena itu, Presiden Xi Jinping menciptakan kebijakan ekonomi internasional yang dikenal sebagai "mimpi Cina" pada tahun 2012, dengan dua tujuan utama: membangun masyarakat madani pada tahun 2021 dan modernisasi pada tahun 2049. Perekonomian Tiongkok direformasi pada tahun 1978 oleh pemerintahan Presiden Deng Xiaoping. Perubahan ini mengubah ekonomi tertutup negara menjadi perekonomian terbuka yang berorientasi pasar, yang mendorong perdagangan dan investasi internasional, dan membuat negara tetangga Tiongkok menggunakannya. Akibatnya, kebijakan ekonomi internasional yang disebut sebagai "mimpi Cina" didirikan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2012 dengan dua tujuan utama: Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) melarang setiap negara untuk menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap negara lain.¹¹

Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi global melalui perdagangan internasional antar negara yang bekerja sama, yang dapat membantu ekonomi negara berkembang. Amerika Serikat menerapkan kebijakan karena Tiongkok mencuri Hak Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual) negaranya. Amerika Serikat menilai bahwa perusahaan Tiongkok yang berada di Amerika Serikat dan beberapa produk elektronik, termasuk program aplikasi, digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk meretas dan mencuri teknologi Amerika Serikat, seperti teknologi industri dan persenjataan militer, untuk bersaing dengan Amerika Serikat. Hal ini juga didukung dengan bukti dari persenjataan militer Tiongkok seperti pesawat terbang yang memiliki desain yang mirip dengan persenjataan Amerika Serikat.¹²

Dampak Perang Dagang Terhadap Indonesia

Akibat kurangnya infrastruktur dan kurangnya lapangan pekerjaan, sektor ekonomi Indonesia membutuhkan bantuan perekonomian internasional untuk menopang pertumbuhan ekonomi lokal yang lambat. Jadi Indonesia menggunakan sistem kerja sama non-blok, yang tidak memihak pada satu sisi, dalam kerja sama internasional. Indonesia memiliki mitra dagang dengan Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang impor dan ekspor bahan baku dan nonmigas. Kamboja, Vietnam, dan Indonesia sendiri adalah beberapa negara yang terkena dampak kebijakan proteksi yang melambatkan ekonomi global. Di sisi lain, dampak yang dialami

Indonesia pada tahun 2017 masih relatif kecil, karena ekspor bahan baku non migas Indonesia ke Tiongkok masih bertahan pada 14%, atau 21 miliar dolar AS. Ini menggeser tujuan ekspor non migas sebelumnya Indonesia, Amerika Serikat, yang saat itu bernilai 17 miliar dolar AS. Pada tahun yang sama, perang dagang menyebabkan industri lokal dan usaha kecil dan menengah (UMKM) bersaing lebih keras untuk membuat barang yang dapat diekspor, seperti peningkatan ekspor tekstil Indonesia sebesar 20-30 persen.

Setelah Indonesia mengalami perang dagang pada tahun 2018, dampaknya mulai terlihat. Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia melemah pada level 6.194,50, dan harga ekspor minyak kelapa sawit menjadi 556 USD per ton dan ekspor batu bara menjadi 88,3 USD per ton.¹³ Pada tahun 2018, pasar modal Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pertumbuhan 200.935 SID (single ide investor) dengan penambahan 1500 investor baru setiap hari, meskipun dampak dari perang dagang dan perlambatan perekonomian global mulai merambat ke dalam perekonomian.

Karena perang itu sendiri, nilai ekonomi Indonesia menurun, dan dampaknya telah menyebar ke negara lain, melemahkan dan memperlambat ekonomi tujuh puluh negara tujuan ekspor Indonesia, yang berdampak pada neraca perdagangan dan komoditas Indonesia. Selain itu, penurunan IHSG dalam industri juga berdampak pada penurunan perekonomian Indonesia. Pada tahun ini, hasil industri lokal tidak optimal karena harga bahan baku impor yang tinggi dan hasil industri dengan harga ekspor yang tidak sebanding dengan kebutuhan bahan impor. Indonesia masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% dan menjaga inflasi di bawah 3,5% meskipun sektor ekspor dan impor mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan proteksi yang memicu perang dagang memiliki dampak yang cukup besar pada perekonomian Indonesia, meskipun perlambatan ekonomi global setiap tahun sejak penerapan kebijakan tersebut terjadi. Karena pandemi COVID-19, perekonomian banyak negara menurun drastis pada tahun 2020. Namun, pada triwulan keempat keadaan perekonomian mulai membaik, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks PMI global pada bulan Oktober, serta peningkatan harga komoditas seperti minyak kelapa sawit, kedelai, dan hasil tambang di pasar global. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menurun sebesar 2,07% dari tahun sebelumnya.

Selain melambatnya perekonomian negara lain, hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama pada ekspor dan investasi saham. Harga komoditas dari bahan baku Indonesia, yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki nilai ekspor tinggi, juga turun. Karena kurangnya infrastruktur dan perekonomian yang melambat, investor asing kurang meminati saham IHSG Indonesia. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dan UMKM lokal berhasil mengurangi dampak perang dagang terhadap Indonesia. Nilai perekonomian Indonesia dapat bertahan pada kisaran 5,02-5,18 persen dibandingkan dengan negara lain yang mengalami penurunan ekonomi dan banyak investor lokal yang meningkatkan dasar modal setiap tahunnya. Untuk penelitian selanjutnya, kita dapat memperbarui diskusi tentang bagaimana Indonesia dapat mempertahankan kestabilan ekonominya di tengah krisis global dengan menjelaskan komponen dan jenis kebijakan yang efektif untuk menjaga kestabilan ekonomi.

KESIMPULAN

Perang perdagangan antara AS dan China yang mencapai puncaknya sejak tahun 2018 adalah salah satu kejadian ekonomi-politik paling penting dalam 20 tahun terakhir. Kebijakan tarif yang diterapkan sepihak oleh pemerintah AS tidak hanya memengaruhi hubungan

perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar, tetapi juga mengguncang sistem perdagangan internasional yang selama ini berlandaskan pada liberalisme dan multilateralitas.

Dari sudut pandang ekonomi, perang perdagangan ini menyebabkan gangguan dalam rantai pasok global, memperbesar biaya produksi, dan menurunkan efisiensi distribusi barang. Perusahaan-perusahaan multinasional harus mengubah rencana produksi mereka, dan banyak negara berkembang mengalami penurunan ekspor, menghalangi investasi, serta menghadapi tekanan dalam industri domestik. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, juga merasakan dampak dari kondisi ini.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan tarif perlindungan AS terhadap produk baja dan aluminium secara langsung mengurangi daya saing ekspor Indonesia menuju pasar AS. Selain itu, akibat tidak langsungnya, Indonesia juga menerima produk-produk China yang mencari pasar baru, yang memberikan tekanan besar kepada produsen lokal. Di sisi lain, perang perdagangan ini memberikan peluang strategis untuk menarik investasi yang pindah dari China, memperkuat proses hilirisasi industri, serta mendiversifikasi mitra dagang ke wilayah non-tradisional.

Dari perspektif politik internasional, perang perdagangan ini mencerminkan pergeseran dalam struktur kekuasaan global dan perubahan sikap kebijakan luar negeri AS dari liberalisme ke nasionalisme ekonomi. Pendekatan tarif yang diambil oleh AS tidak hanya didasari oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik untuk menghambat laju kemunculan China sebagai kekuatan dominan yang baru.

Dalam kerangka teoretis, fenomena ini menggambarkan keterkaitan antara proteksionisme ekonomi dan pendekatan kebijakan luar negeri yang adaptif. Proteksionisme digunakan untuk melindungi industri domestik sekaligus berfungsi sebagai alat tekanan politik. Sementara itu, model kebijakan luar negeri adaptif menjelaskan bahwa perang dagang ini adalah reaksi AS terhadap tantangan eksternal dari China serta ketidakpuasan internal dari pemilih terkait globalisasi.

Dalam situasi ini, Indonesia perlu mengadopsi langkah yang tidak hanya responsif, tetapi juga bersifat strategis dan proaktif. Negara ini harus memperkuat ketahanan ekonominya melalui pembangunan industri lokal yang lebih solid, peningkatan daya saing tenaga kerja, reformasi birokrasi yang komprehensif, serta melaksanakan diplomasi ekonomi secara aktif di berbagai forum internasional. Di tengah ketidakpastian global yang ditandai oleh fragmentasi perdagangan, Indonesia harus menjadi aktor yang adaptif dan tangguh, bukan hanya mengikuti perkembangan global, tetapi juga menciptakan peluang baru.